

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SOPPENG

TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. sesuai Peraturan Daerah Kab. Soppeng no.5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

- FUNGSI :
- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	RUMUS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pengunjung Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	Org	KABID PENGOLAHAN, PELAYANAN DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA	Buku Pengunjung Perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah kunjungan ke perpustakaan umum daerah selama satu tahun}}{\text{Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani}} \times 100\%$	
		Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	Judul	KABID PENGOLAHAN, PELAYANAN DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA	Buku Register Koleksi Bahan Pustaka	$\frac{\text{Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah}}{\text{Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah}} \times 100\%$	
2	Meningkatnya Penerapan Arsip secara Baku	Pengelolaan Arsip secara baku	SKPD	KABID PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEARSIPAN	Daftar Nama SKPD yang telah dibina	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang mengelola arsip secara baku}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	
		Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	SKPD	KABID PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEARSIPAN	DPPA Tahun Anggaran 2017	Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelolaan kearsipan	
3	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah	%	SEKRETARIS	Kuisisioner	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja IKU}}{\text{Jumlah indikator}} \times 100\%$	

Watansoppeng, 16 Januari 2019

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SOPPENG**

Drs. RIDWAN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 196106201989031009



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Jl. Attang Benteng No. 5 ☎ (0484) 21074 Watansoppeng 90812

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 22.a / KPAD / VII / 2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH TAHUN 2016-2021

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Soppeng tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4585) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 90 Tahun 2008);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 93 Tahun 2008);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 111 Tahun 2010);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 97 Tahun 2016);
15. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

Memperhatikan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016-2021**

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama adalah keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah;

Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ini.

Pasal 3.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal : 28 Juli 2016

**KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN
ARSIP DAERAH KABUPATEN SOPPENG,**

Drs. A. PAWELLOI, M. Si.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19590113 198703 1 006

